

TESIS

**INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAYANAN
MASYARAKAT PADA PERKARA PIDANA ANAK**



Diajukan Oleh:

SARAI DWI SARTIKA

NIM. 2120215320081

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2023

**INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PELAYANAN MASYARAKAT PADA PERKARA PIDANA ANAK**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

SARAI DWI SARTIKA

NIM. 2120215320081

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

Juni 2023

Judul Tesis : **Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Pelayanan Masyarakat Pada Perkara Pidana Anak**
Nama : **Sarai Dwi Sartika**
NIM : **2120215320081**

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



DR. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012004

Pembimbing Pendamping

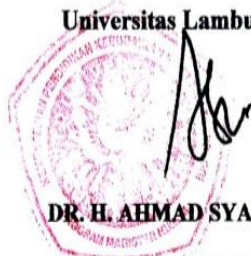



Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui,

Kordinator Program Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

DR. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat




Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 1974061520031210011004

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

Tesis ini telah di periksa dan dipertahankan

Pada Tanggal... 05 JUL 2023

Pembimbing Utama

DR. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.

NIP. 198302172005012009

Disahkan Oleh

Koordinator Program Magister Hukum

DR. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 1974061520031210011004

Tesis ini telah dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdulah, S.H., M.H

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Dr. Misapanyah, S.H., M.H

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

Penulis persembahkan tulisan tak sempurna ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta P. Immanuel Bangun, S.E., M.M dan Dra. Harlina Ria.

Kedua saudara perempuanku terkasih yang sedang sama-sama berjuang mengejar S2.

Kak Cin serta Ecot

Bang Ari, abang ipar penulis dan Abang Ethan Ganteng Keponakan tersayang Bi ngah

Gara.

Terimakasih

Penulis ucapkan atas dukungan dan motifasi yang telah diberikan, sehingga tesis ini mampu terselesaikan sebagai bentuk khazanah perluasan literasi ilmiah yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai kalangan dan menjadi amal jariah bagi penulis serta keluarga yang dipersembahkan dalam penulisan ini.

God is within her, she will not fail (Psalm 46:5)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarai Dwi Sartika
NIM : 2120215310013
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarbaru, Juli 2023

 g membuat pernyataan,

Sarai Dwi Sartika

NIM. 2120215320081

SARTIKA, SARAI DWI. 2023. INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT PADA PERKARA PIDANA ANAK. MAGISTER HUKUM, PROGRAM PASCASARJANA, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT. PEMBIMBING UTAMA: Dr.H.AHMAD SYAUFI, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H. 100 Halaman.

RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana seorang anak yang terlibat tindak pidana haruslah tetap dilindungi oleh negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Penjatuhan Pidana pelayanan masyarakat merupakan salah satu jenis pidana alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana penjara dan menjadikan anak lebih bertanggung jawab dengan pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan padanya. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Pasal 15 ayat 1 peraturan tersebut berbunyi bahwa: “Dalam hal putusan pengadilan berupa pelayanan masyarakat, jaksa menempatkan anak dalam Lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan..” sehingga menimbulkan dilema bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana Pelayanan Masyarakat. Hal inilah yang akan dikaji lebih dalam mengenai apakah kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat mengenai independensi hakim dalam memutus perkara pidana anak setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak? serta Bagaimana formulasi penormaan pada Peraturan Pemerintah yang tidak mengerus kebebasan Hakim dalam memutus perkara? Tesis ini akan dibahas dalam prespektif yuridis normatif, yaitu

menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya penormaan kembali atas aturan pelaksana UU SPPA tersebut agar tidak bertentangan dengan UU Kekuasaan Pengadilan serta UU SPPA itu sendiri, sehingga nantinya tesis ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah untuk kembali merumuskan aturan hokum terkait pidana pelayanan masyarakat pada anak, yang nantinya membantu Penegak Hukum terutama Hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.

Sartika, Sarai Dwi. 2023. Independensi Hakim dalam menjatuhkan Pidana Pelayanan Masyarakat Pada Perkara Pidana Anak. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.** Pembimbing Pendamping: **100 Halaman.**

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana seorang anak yang terlibat tindak pidana haruslah tetap dilindungi oleh negara. Penjatuhan Pidana pelayanan masyarakat merupakan salah satu jenis pidana alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana penjara. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Pasal 15 ayat 1 peraturan tersebut berbunyi bahwa: “Dalam hal putusan pengadilan berupa pelayanan masyarakat, jaksa menempatkan anak dalam Lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan..” pasal tersebut menimbulkan dilema bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana Pelayanan Masyarakat. Hal inilah yang akan dikaji lebih dalam mengenai apakah kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat mengenai independensi hakim dalam memutus perkara pidana anak setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak? serta Bagaimana formulasi penormaan pada Peraturan Pemerintah yang tidak mengenai kebebasan Hakim dalam memutus perkara? Tesis ini akan dibahas dalam prespektif yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya penormaan kembali atas aturan pelaksana UU SPPA tersebut agar tidak bertentangan dengan UU Kekuasaan Pengadilan serta UU SPPA itu sendiri, sehingga nantinya tesis ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah untuk kembali merumuskan aturan hukum terkait pidana pelayanan masyarakat pada anak, yang nantinya membantu Penegak Hukum terutama Hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.

Kata Kunci: *Independensi Hakim, Pidana Anak, Pelayanan Masyarakat*

SARTIKA, SARAI DWI SARTIKA. 2023. Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelayanan Masyarakat pada Perkara Pidana Anak. *Magister of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I :*

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H and Advisor II: Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.

100 Page.

ABSTRAK

Children are the nation's next generation, and a child involved in a crime must still be protected by the state. The imposition of a community service crime is an alternative type of punishment to a crime of deprivation of liberty or imprisonment which aim to prevent children from the negative effects of applying prison sentences. After the birth of Government Regulation Number 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for the Implementation of Crime and Actions Against Children, Article 15 paragraph 1 of the regulation reads that: "In the case of a court decision in the form of community service, the prosecutor places the child in a public service institution, both owned by the government and private sector that has been determined based on the results of community research.." This article creates a dilemma for the Judge in imposing a Community Service Criminal decision. This is what will be studied in more depth regarding whether the obligation of judges to consider the results of community research undermines the independence of judges in deciding criminal cases against children. and how is the formulation of norms in government regulations that do not undermine the freedom of judges in deciding cases? This thesis discusses the dilemma faced by judges in imposing community service criminal decisions but could benefit from specific cases or scenarios to Illustrate the point. Furthermore, these problems can be overcome by re-norming the implementing regulations for the SPPA Law so that they do not conflict with the Law on Judicial Powers and the SPPA Law itself so that later this thesis is expected to be able to provide input to the government to re-formulate legal rules related to community service crimes for children, which will later assist law enforcement, especially judges in making decisions to impose community service crimes for children.

Keywords: Judge Independence, Juvenile Crime, Community Service

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Bapa kekal yang telah menciptakan manusia dengan akal budi menjadikan manusia dapat mempergunakan akal pikirannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT PADA PERKARA PIDANA ANAK”**.

Penelitian ini dapat selesai tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
2. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan tesis sehingga sampai pada tahap ini serta dapat terselesaikan menjadi suatu karya Ilmiah yang semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan;
3. Ibu Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan tesis sehingga dapat terselesaikan;
4. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh jenjang studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Papaku tersayang, P. Immanuel Bangun, S.E., M.M yang mengajarkan arti cinta tanpa syarat sesungguhnya, laki-laki yang menjadi teladan bagi penulis untuk berserah pada Tuhan dalam setiap keadaan. Mamaku tercinta, Dra. Harlina Ria, ibu terhebat sepanjang masa yang mengajarkan ketulusan dan arti cukup dalam hidup, kedua saudara perempuan terbaik penulis Revany Yoexarin Bangun, S.H., (yang sedang menempuh Magister Hukum di Universitas Indonesia), Theresia Claudia, S.E, (yang sedang menempuh Magister Ekonomi di King College, London, Inggris) untuk keduanya selalu hadir dalam suka dan duka menjadi alarm penyemangat penulis menyelesaikan magister ini, Abang Ipar Penulis, Ari Pranata Sembiring Milala, S.E., M.M, ponakan tersayang Bingah Ethan Anantha Semibiring Milala, dan tentu saja Gara yang selalu ada dan membuat penulis bangkit dalam setiap keadaan.
7. Genk UIM Bund Ndari, Bund Lina, Bund Arini wulandari, dan Bund Firman yang mewarnai masa perkuliah S2 penulis dengan canda, tawa dan pertanyaan mau makan dimana?;
8. ASD (Arny dan Dosi) dan Kak Shenny, sahabat yang menjadi teman keluh kesah menyelesaikan tesis ini dengan baik;
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari penelitian tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman. Terlepas

dari segala kekurangan dalam penulisan tesis ini semoga bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Banjarbaru, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

TESIS

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
<u>HALAMAN PENGESAHAN.....</u>	<u>ii</u>
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAN.....	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.

- A. LATAR BELAKANG
- B. RUMUSAN MASALAH
- C. KEASLIAN PENELITIAN
- D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....
- E. TINJAUAN PUSTAKA
- F. METODE PENELITIAN.....
- G. PERTANGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN REKOMENDASI BAPAS DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ANAK SETELAH LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK

-
- A. PERAN BAPAS DALAM PERKARA PIDANA ANAK

- B. PERAN HAKIM SEBAGAI PEMUTUS PERKARA PIDANA ANAK..... **Error!**
Bookmark not defined.
- C. INDEPENDENSI HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA ANAK SETELAH LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK, SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK..... **Error!**
Bookmark not defined.

BAB III FORMULASI PENORMAAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAKError! Bookmark not defined.

- A. MENYELARASKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... **Error!**
Bookmark not defined.
- B. USULAN RUMUSAN PASAL 15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK **Error!**
Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan..... **Error!**
Bookmark not defined.
- B. Saran..... **Error!**
Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP